BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan seiring perkembangannya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai konsekuensi atas dasar hukum tersebut maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Salamun (2007) menyatakan bahwa tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pemerintahan (sektor publik) untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah dalam bentuk pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Oleh karena itu laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik untuk berbagai kepentingan pengguna salah satunya pengguna informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Namun pada kenyataannya laporan keuangan pemerintah daerah masih jauh dari harapan. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data dari IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) yang dikeluarkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk semester satu tahun 2012, perkembangan opini yang diterima oleh LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) di Indonesia dalam kurun waktu enam tahun menunjukkan hasil sebagai berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan Opini LKPD

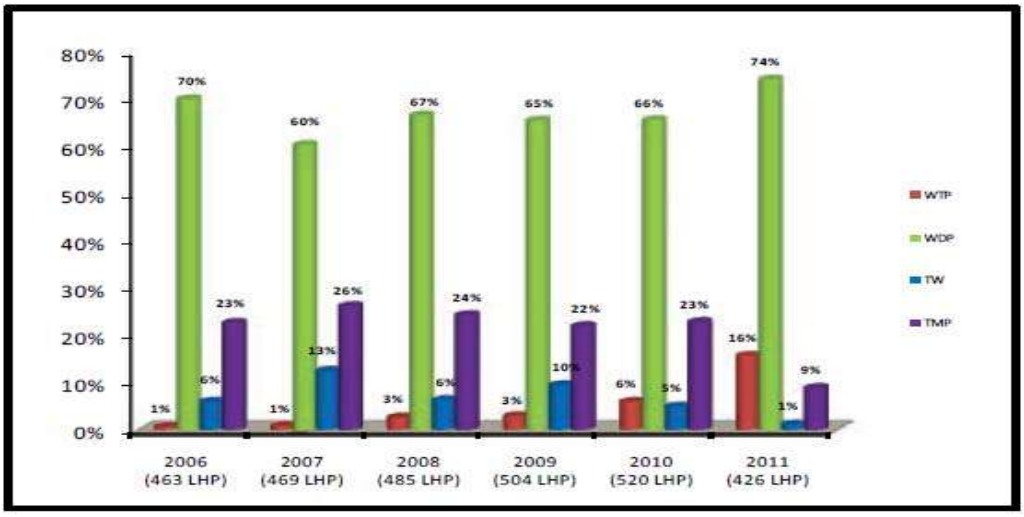

Sumber: www.bpk.go.id (IHPS I 2012)

Dari grafik 1.1 dapat kita lihat bahwa persentase LKPD yang memperoleh opini WTP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 16%, meningkat 10% dari Tahun 2010 sebanyak 6%. Persentase LKPD yang memperoleh opini WDP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 74%, meningkat 8% dari Tahun 2010 sebanyak 66%. Persentase LKPD yang memperoleh opini TW pada Tahun 2011 adalah sebanyak 1%, turun 4% dari Tahun 2010 sebanyak 5%. Persentase LKPD yang memperoleh opini TMP pada Tahun 2011 adalah sebanyak 9% turun 14% dari Tahun 2010 sebanyak 23%.

Walaupun dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini terdapat peningkatan jumlah LKPD yang mendapat opini dengan kategori paling baik yaitu WTP namun jika dibandingkan dengan opini TW dan TMP, peningkatannya tidak signifikan dan masih merupakan sebagian kecil dari keseluruhan LKPD yang diperiksa.

Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu yaitu Henry Purnomo (tanggal 14 Desember 2010) mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementrian Keuangan, mengungkapkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) masih belum berjalan baik. Pemda dinilai masih belum maksimal dalam penyampaian laporan keuangannya sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran. (http://www.jpnn.com)

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, tediri atas:

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Menurut Asisten Administrasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, H. Iwa Karniwa dalam dialog pengelolaan keuangan negara/daerah menyatakan bahwa, “Laporan keuangan yang berkualitas baik yaitu laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK karena hal itu

merupakan indikator baiknya pengelolaan keuangan dan seharusnya diprioritaskan untuk mendapat pendanaan yang lebih memadai dalam penentuan dana perimbangan (DAU/DAK/dll)".

Sedangkan pada Pemerintah Kota Bandung sendiri selama kurun waktu enam tahun dari tahun 2006 sampai 2011 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kecuali pada tahun 2009 yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011 juga ditemui kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah. (IHPS II Tahun 2011)

Temuan kasus-kasus pada Pemerintah Kota Bandung dijelaskan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) Tahun 2011 dimana terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	11	2.356.56
2	Potensi Kerugian Daerah	2	17.836.25
3	Kekurangan Penerimaan	3	-
4	Administrasi	1	-
5	Ketidakhematan	0	-
6	Ketidakefektifan	0	-

Sumber: IHPS Semester II Tahun 2011

Dimana kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pembayaran honorarium dan/atau

perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan. Kasus potensi daerah yaitu piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, kasus kekurangan penerimaan yaitu penggunaan langsung penerimaan dan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan. (IHPS Semester II Tahun 2011)

Kasus pada administrasi penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan sisa kas di bendahara pengeluaran akhir TA terlambat/belum disetor ke kas daerah. (IHPS Semester II Tahun 2011)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh

personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Penelitian yang dikemukakan oleh Zetra (2009) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software*, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen dari

Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan keinginan dari setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) untuk melakukan perubahan sesuai dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang-undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat (komitmen) dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki keuangan negara, termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut akan berdampak pada semakin baiknya kualitas dari informasi laporan keuangan.

Penelitian mengenai Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi pernah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) memberikan temuan empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia signifikan mempengaruhi *timeliness* pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan dan *timeliness* pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian mengenai Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi juga dilakukan oleh Faristina Rosalin (2011), dari penelitiannya, Faristina menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) dengan adanya perbedaan pada unit analisisnya. Pada penelitian ini, penulis

menggunakan unit analisis kepala bagian akuntansi untuk setiap variabel independen dan auditor di inspektorat untuk variabel dependen sedangkan pada penelitian sebelumnya unit analisis yang digunakan adalah kepala bagian akuntansi serta staf di bagian akuntansi untuk masing-masing variabelnya. Penulis juga menggunakan variabel komitmen organisasi untuk diuji. Dipilihnya komitmen organisasi karena didasari bahwa komitmen organisasi sarat dengan nilai dan sasaran. Istilah tersebut mengandung makna sebuah proses bagaimana nilai dan sasaran tersebut tercapai atau dengan kata lain komitmen organisasi merupakan syarat sebuah keberhasilan (Azhar, 2007).

Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung karena dianggap cukup mewakili kriteria yang dipilih. Hal ini terkait dengan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat pada tahun 2009.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung?
2. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

2. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis dan akademis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah daerah khususnya bagi pemerintah daerah Kota Bandung diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran sebagai masukan guna meningkatkan kinerja terutama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi serta masukan atau pertimbangan untuk mengembangkan keilmuan akuntansi, khususnya mengenai akuntansi sektor publik.